

Implementasi Protokol Kesehatan Covid-19 pada Petugas Kesehatan di Puskesmas Baki Sukoharjo

Implementation of The Covid-19 Health Protocol on Health Officers at The Baki Sukoharjo Health Center

Ester Kristian Pamurti¹, Iik Sartika², Akhmad Azmiardi³

Program Studi Kesehatan Masyarakat, FKM Universitas Veteran Bangun Nusantara^{1,2,3}

Email : esterkristianpamurti@gmail.com

ABSTRACT

Baki Sukoharjo Health Center is known to experience an increase in the number of positive COVID-19 patients per June-December 2020, a decrease in the average number of patients per January-April 2021, there are 7 health workers who are confirmed positive for COVID-19 in 2019-2021, and in implementing the health protocol, health workers experience problems, namely the lack of complete and equitable APD so that health workers need to bring their own APD, which can affect the four variables of the Van Meters and Van Horn models. The purpose of research was to determine the implementation of the COVID-19 health protocol for health workers at the Baki Sukoharjo Health Center.

The research was qualitative research with methods *study case*. The research instrument used interview guidelines and observation guidelines. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model (data reduction, data *display*, *conclusion drawing* or *verification*).

The results of the research based on the four variables of the Van Meters and Van Horn Models showed that the standards and policy targets were good because there were SPO COVID-19 based on the 5th revision of the COVID-19 prevention and control guidelines and the Ministry of Health's Technical Guidelines; inadequate human and non-human or physical resources; the characteristics of the implementing agency are good because there is an organizational structure and a fast-moving team for handling COVID-19; and the disposition of the implementor that the implementing agency for the SPO COVID-19 has been implemented properly. So, it can be concluded that the implementation of the COVID-19 health protocol for health workers at the Baki Sukoharjo Health Center has been good.

The research given suggestions to the Baki Sukoharjo Health Center are to propose the need for better coordination regarding duties and authorities or doing *rolling* work so that they do not experience obstacles in implementing the COVID-19 health protocol for health workers in Baki Sukoharjo Health Center in order to achieve better program outcomes.

Key words : Implementation, COVID-19 Health Protocol, Health Service

ABSTRAK

Puskesmas Baki Sukoharjo diketahui mengalami peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 per bulan Juni-Desember tahun 2020, penurunan rata-rata jumlah pasien per bulan Januari-April tahun 2021, terdapat 7 petugas kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada tahun 2019-2021, serta dalam pelaksanaan protokol kesehatan petugas kesehatan mengalami kendala yaitu kurang tersedianya APD yang lengkap dan merata sehingga petugas kesehatan perlu membawa sendiri APD dapat mempengaruhi empat variabel dari Model Van Meters dan Van Horn. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi protokol kesehatan COVID-19 pada petugas kesehatan di Puskesmas Baki Sukoharjo.

Jenis dan rancangan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *study* kasus. Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi. Teknik analisis data menggunakan Model Miles dan Huberman (data reduksi, data *display*, *conclusion drawing* atau *verification*).

Hasil penelitian berdasarkan empat variabel Model Van Meters dan Van Horn didapatkan hasil bahwa standar dan sasaran kebijakan sudah baik karena terdapat SPO COVID-19 berpedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 revisi ke-5 dan Juknis Kemenkes; sumber daya manusia dan non manusia atau fisik belum memadai; karakteristik agen pelaksana sudah baik karena terdapat struktur organisasi dan tim gerak cepat penanganan COVID-19; serta disposisi implementor bahwa agen pelaksana SPO COVID-19 sudah dilaksanakan dengan baik. Sehingga, dapat disimpulkan implementasi protokol kesehatan COVID-19 pada petugas kesehatan di Puskesmas Baki Sukoharjo sudah baik.

Saran kepada pihak Puskesmas Baki Sukoharjo yaitu perlunya koordinasi lebih baik lagi mengenai tugas dan wewenang atau melakukan *rolling* kerja sehingga tidak mengalami hambatan dalam mengimplementasi protokol kesehatan COVID-19 pada petugas kesehatan di Puskesmas Baki Sukoharjo agar dapat tercapainya capaian program yang lebih baik lagi.

Kata kunci : Implementasi, Petugas Kesehatan, Protokol Kesehatan COVID-19

PENDAHULUAN

Corona virus atau virus corona adalah bagian dari bermacam-macam virus yang dapat menyebabkan infeksi pada bagian saluran pernapasan bagian atas dengan tingkat ringan dan sedang yang ditemukan pertama kali di Kota Wuhan pada bulan November 2019. *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *pandemic* dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Menurut Betty (dalam Marzuki, 2021), virus corona merupakan jenis virus varian baru yang memiliki tingkat penyebaran atau penularan lebih tinggi dibandingkan virus varian sebelumnya dan menyebabkan wabah pneumonia yang meluas secara global sehingga disebut *Coronavirus Disease* (COVID-19).

Kasus COVID-19 dunia global pada tanggal 09 Mei 2021 telah menginfeksi 157.289.118 yang dikonfirmasi, termasuk 3.277.272 kasus kematian (WHO, 2021). Sedangkan, Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan bahwa terdapat

1.709.762 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi dan terdapat 46.842 kasus yang meninggal terkait COVID-19 serta jumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 berjumlah 1.468.764 (WHO, 2021).

Statistik kasus COVID-19 Jawa Tengah melaporkan terdapat 190.889 kasus yang terkonfirmasi dan 12.086 kasus yang meninggal, serta jumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 bulan Februari 2021 terdapat 250 lebih setiap minggu (Yulianto dalam Handy, 2021). Wilayah Kabupaten Sukoharjo termasuk peringkat keenam dalam provinsi Jawa Tengah dengan 5.097 kasus terkonfirmasi COVID-19 dan 428 kasus yang meninggal, serta terdapat kasus tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 tahun 2020 berjumlah 28 petugas kesehatan. Wilayah Kecamatan Mojolaban termasuk peringkat kesatu, Kecamatan Kartasura termasuk peringkat kedua, dan Kecamatan Baki termasuk peringkat ketiga dalam kabupaten Sukoharjo dengan 1538 kasus terkonfirmasi COVID-19 dan 70 kasus serta 132 kasus suspek pada bulan Agustus 2021 (Jateng, 2021).

Dalam upaya penanggulangan COVID-19, diperlukan pedoman protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) (Kepmenkes No.HK.01.07/Menkes/1591 Tahun 2020).

Salah satunya di Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Permenkes RI No 43 Tahun 2019).

Puskesmas merupakan garda terdepan dan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar yang memiliki prinsip kewilayahan mampu menjangkau seluruh masyarakat di wilayah kerjanya. Pada masa *pandemic*, peran Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya, puskesmas bertugas melakukan upaya-upaya mencegah, mendeteksi dan bertindak responsif dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Selain itu, Puskesmas yang memiliki sistem manajemen harus mampu mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia tenaga kesehatan dan non kesehatan, sumber daya anggaran dan informasi. (Indriyanti, 2020).

Menurut Permenkes No. 33 Tahun 2015, sumber daya manusia kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Sehingga, pihak manajemen dituntut responsif menerapkan secara efektif dan efisien seluruh sumber daya tersebut dalam upaya memutus penularan COVID-19, baik di level individu petugas, keluarga maupun masyarakat sasaran karena tingginya resiko tenaga kesehatan terpapar atau terinfeksi COVID-19 disebabkan oleh lamanya terpapar virus dan jumlah virus yang banyak (Indriyanti, 2020).

Manajemen Puskesmas harus mencari cara untuk mendorong para karyawannya untuk mempunyai kemauan dalam bekerja untuk mencapai upaya memutus penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kepmenkes No. HK. 01.07/Menkes/1591 Tahun 2020 menyatakan bahwa bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib mematuhi protokol kesehatan di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya yaitu menggunakan alat pelindung diri dan memperketat penggunaan alat pelindung diri bagi petugas kesehatan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui

implementasi protokol kesehatan COVID-19 pada petugas kesehatan di Puskesmas Baki Sukoharjo.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek atau informan pada penelitian ini adalah ketua tim gerak cepat penanganan COVID-19, koordinator lapangan tim gerak cepat penanganan COVID-19, 22 petugas kesehatan (perwakilan 2 petugas dari setiap jenis ketenagaan petugas kesehatan di Puskesmas Baki Sukoharjo). Sedangkan, objek pada penelitian ini adalah pedoman pencegahan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), protokol kesehatan di fasilitas pelayanan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), serta SPO COVID-19 di Puskesmas Baki Sukoharjo.

Variabel yang diteliti yaitu (1) Standar dan sasaran kebijakan meliputi tersedianya SPO yang jelas dan terukur dan dijadikan sebagai acuan atau pedoman, (2) Sumber daya meliputi tersedianya sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang memadai, tersedianya fasilitas (sarana, prasarana serta dana atau anggaran), (3) Karakteristik agen pelaksana meliputi adanya struktur organisasi, adanya tim gerak cepat penanganan COVID-19, (4) Disposisi implementor meliputi respon atau sikap implementor, kognisi atau pemahaman SPO COVID-19, intensitas disposisi implementasi atau komitmen mematuhi SPO COVID-19. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, *recorder* dan kamera di HP, buku dan alat tulis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dari subjek atau informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi dengan mengamati langsung terhadap standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor. Data sekunder diperoleh melalui pihak lain meliputi data Puskesmas Baki Sukoharjo (data pasien COVID-19 Tahun 2020), SPO COVID-19 di Puskesmas Baki Sukoharjo, buku profil puskesmas baki sukoharjo tahun 2020, data jenis ketenagaan di Puskesmas Baki Sukoharjo, struktur organisasi di Puskesmas Baki Sukoharjo, serta data tim gerak cepat penanganan COVID-19 di Puskesmas Baki Sukoharjo.

Triangulasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, serta triangulasi teori. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dengan lima langkah yaitu *collecting*, *coding*, *editing*, *classification*, penyajian data kemudian dianalisis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman meliputi data reduksi, data *display*, *conclusion drawing* atau *verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Puskesmas Baki Sukoharjo terletak di wilayah kecamatan Baki dan berada di tepi jalan utama provinsi yang berjarak 12 km dari kota kabupaten. Luas wilayah kerja sekitar 23 km², yang terdiri dari 614.303 Ha sawah dan 592.975 Ha tanah. Wilayah kerja Puskesmas Baki Sukoharjo meliputi 14 desa yaitu desa Kudu, Kadilangu, Pandeyan, Menuran, Duwet, Siwal, Waru, Bentakan, Gedongan, Jetis, Ngrombo, Mancasan, Gentan dan Purbayan. Daerah di wilayah kerja, Puskesmas

Baki Sukoharjo adalah dataran rendah dan merupakan kawasan agraris, industri, dan sebagian merupakan kawasan perkotaan (komplek perumahan), karena di beberapa desa terdapat sentra produksi kerajinan, makanan ringan, industri sedang dan industri besar.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 24 petugas kesehatan, sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Informan

Informan	Jabatan	Jumlah
1	Ketua Tim Gerak Cepat Penanganan COVID-19	1
2	Koordinator Lapangan Tim Gerak Cepat Penanganan COVID-19	1
3	Petugas Kesehatan	22

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini berjumlah 24 petugas kesehatan yang terdiri dari 3 informan yaitu informan 1 dengan jabatan sebagai ketua tim gerak cepat penanganan COVID-19 yang berjumlah 1 petugas, informan 2 dengan jabatan koordinator lapangan tim gerak cepat penanganan COVID-19 yang berjumlah 1 petugas, serta informan 3 dengan jabatan petugas kesehatan yang berjumlah 22 petugas.

Keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. Guna mengetahui implementasi protokol kesehatan COVID-19 pada petugas kesehatan di Puskesmas Baki Sukoharjo dapat diukur melalui beberapa variabel dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn. Variabel pertama dalam penelitian ini adalah standar dan sasaran kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut (Zulfian, 2014). Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan sasaran kebijakan. Menurut Suharno (2016), standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan dan tidak dapat terjadi multi interpretasi serta mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi yang akhirnya akan mengakibatkan sulitnya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Puskesmas Baki Sukoharjo, terkait standar dan sasaran kebijakan yaitu Puskesmas Baki Sukoharjo menggunakan *Standard Procedur Operational (SPO)* COVID-19 yang berpedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 revisi ke-5, Juknis Kemenkes dan disepakati pihak Puskesmas Baki serta sasaran kebijakan yaitu petugas kesehatan dalam mengimplementasi SPO COVID-19 sudah dilaksanakan dengan baik.

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan (Zulfian, 2014). Menurut Suharno (2016), implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia atau fisik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Puskesmas Baki Sukoharjo, terkait sumber daya manusia yaitu Puskesmas Baki Sukoharjo memiliki 109 petugas kesehatan, namun

terdapat petugas kesehatan yang mengeluh kekurangan tenaga. Selain itu, sumber daya non manusia atau fisik yaitu faktor pendukung atau fisik seperti alat pelindung diri, obat-obatan atau vitamin, alat-alat medis COVID-19 yang terkendala karena belum terealisasi dari Dinas Kesehatan sehingga alat pelindung diri seperti *nurse cap, handscoon, google glass, apron plastik, face shield*, serta hazmat dan masker harus membeli sendiri dari rumah seperti yang diungkapkan oleh informan 1, informan 5 selaku perawat serta informan 11 selaku sanitarian yang mengeluh alat pengelolaan sampah medis COVID-19 yang berkaitan di unit kesehatan lingkungan belum teralisasi dari Dinas Kesehatan sampai saat ini. Sedangkan, untuk anggaran sudah tersedia dari BLUD, BOK, Dinas Kesehatan.

Variabel ketiga dalam penelitian ini yaitu karakteristik agen pelaksana. Menurut Suharno (2016), karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya yang berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin (Zulfian, 2014). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Puskesmas Baki Sukoharjo, terkait karakteristik agen pelaksana dimana terdapat struktur organisasi di Puskesmas Baki Sukoharjo yang mempunyai 109 petugas kesehatan dan terdapat tim gerak cepat penanganan COVID-19 yang sudah bertanggung jawab dengan baik dalam melakukan tugas pelayanannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Poli (2021) tentang implementasi program mapalus COVID-19 di desa Kanonang Satu, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa yang menyatakan bahwa diperlukan pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan.

Variabel keempat atau terakhir dalam penelitian ini adalah disposisi implementor yang mencakup tiga hal yakni respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor (Suharno, 2016). Menurut Zulfian (2014), sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil bisa gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Serta disposisi implementor (para pelaksana) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting, implementor bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Puskesmas Baki Sukoharjo, terkait disposisi implementor yang mencakup respon atau sikap, kognisi atau pemahaman, serta intensitas disposisi implementor atau kepatuhan sudah baik sehingga dapat dipahami bahwa agen pelaksana kebijakan yaitu petugas kesehatan sudah melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Standar dan sasaran kebijakan sudah berjalan dengan baik dimana Puskesmas Baki

Sukoharjo menggunakan *Standard Procedur Operational* (SPO) COVID-19 yang berpedoman pedoman pencegahan pengendalian COVID-19 revisi ke-5, Juknis Kemenkes dan disepakati pihak Puskesmas Baki Sukoharjo serta sasaran kebijakan yaitu petugas kesehatan dalam mengimplementasi SPO COVID-19 sudah dilaksanakan dengan baik.

Sumber daya di Puskesmas Baki Sukoharjo terkait sumber daya manusia belum memadai dari segi kuantitas dan sumber daya non manusia atau fisik seperti sarana dan prasarana belum tercukupi dan belum sesuai dengan standar. Vitamin atau obat-obatan sudah tercukupi serta dana atau anggaran sudah tersedia dari BLUD, BOK, Dinas Kesehatan.

Karakteristik agen pelaksana dimana terdapat struktur organisasi di Puskesmas Baki Sukoharjo dan terdapat tim gerak cepat penanganan COVID-19 yang sudah bertanggung jawab dengan baik dalam melakukan tugas pelayanannya.

Disposisi implementor dapat dipahami bahwa agen pelaksana kebijakan yaitu petugas kesehatan sudah melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik.

SARAN

Koordinasi yang lebih baik lagi mengenai tugas dan wewenang dalam manajemen antar petugas Puskesmas Baki Sukoharjo atau melakukan *rolling* kerja agar tidak mengalami hambatan dalam mengimplementasi protokol kesehatan COVID-19 pada petugas kesehatan di Puskesmas Baki Sukoharjo sehingga dapat tercapainya capaian program yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriyanti, Dina. 2020. *Implementasi Protokol Kesehatan pada Petugas Puskesmas di Masa Pandemi: Studi Kasus Puskesmas Cileungsi Kabupaten Bogor*. Jurnal Inovasi Aparatur, VOL. 2, NO. 2, November 2020.
- Jateng, Humas. 2021. *Statistik Kasus COVID-19 Jawa Tengah*. Tanggap COVID-19 Provinsi Jawa Tengah, dilihat 09 Mei 2021, <http://corona.jatengprov.go.id/>.
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019. *Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/1591 Tahun 2020. *Tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015. *Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Suharno. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sugeng, Winarso, dkk. 2020. *Penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 di Era New Normal pada Kampung Tangguh Desa Karangdowo, Terminal Jajag*

dan RTH Maron Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Multidisciplinary Journal, VOL. III. NO. 1, Juli 2020.

WHO. 2021. *WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*. World Health Organization, dilihat 09 Mei 2021, <http://covid19.who.int/>.

Zulfian. 2014. *Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang*. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi, ISSN: 2356-3885, VOL. 1 NO. 2, 2014.